

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
USAHA YANG MEMPERJUALBELIKAN KOSMETIK
YANG TIDAK TERDAFTAR DI BPOM DENGAN
TRANSAKSI E-COMMERCE**

TESIS

Oleh

ANDARA RIVO OCTAVIANTO

201820252006



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang memperjualbelikan Kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dengan transaksi E-Commerce.**

Nama Mahasiswa : **ANDARA RIVO OCTAVIANTO**

Nomor Induk Mahasiswa : **201820252006**

Program Studi/Fakultas : **Magister Ilmu Hukum/Hukum**

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **22 Juli 2021**

Jakarta, 28 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua TIM penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM
NIDN 0312117102

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN 0316077604

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN 0319077606

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN 0127117401

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN 0312117102

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang memperjualbelikan Kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dengan transaksi *E-Commerce*..**

Nama Mahasiswa : Andara Rivo Octavianto

Nomor Induk Mahasiswa : 201820252006

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Juli 2021

Jakarta, 28 Juli 2021

MENYETUJUI :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. DWI ATMOKO, S.H., M.H.
NIDN 0316077604

Dr. NOVIRISKA, S.H., M.Hum.
NIDN 0325117405

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang memperjualbelikan Kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dengan transaksi *E-Commerce*.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 28 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan



Andara Riyo Octavianto
NPM : 201820252006

ABSTRACT

Andara Rivo Octavianto. 201820252006. Criminal Law Enforcement Against Business Actors who trade Cosmetics that are not registered with BPOM with E-Commerce transactions.

This study was conducted to determine the responsibility of the perpetrators of the crime of distributing cosmetics that are not registered with BPOM through offline or e-commerce based on the laws and regulations in force in Indonesia. To find out efforts to reform criminal law in the field of e-commerce cosmetic transactions in the legal system in Indonesia. The theory used in this research is the rule of law theory, the theory of legal certainty, the theory of justice, and the theory of law enforcement. The research method used is empirical normative legal research. Empirical normative legal research (applied law research) is research that uses normative-empirical legal case studies starting from written positive legal provisions that are applied to legal events in concreto in society. The results of this study conclude that the responsibility of the perpetrators of the criminal act of distributing cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) via offline or e-commerce based on the laws and regulations in force in Indonesia through the trial process in the court's decision the judge handed down a criminal sentence that lighter than the criminal threat that has been determined in the law on health and the law on consumer protection, it can even be imposed with a conditional criminal consideration which in the end does not cause a deterrent effect for perpetrators of criminal acts who distribute cosmetics that do not have a distribution permit from the Agency. Food and Drug Supervisor. And efforts to reform criminal law in the field of cosmetic transactions by e-commerce in the legal system in Indonesia require a realignment of government institutions/institutions against the ineffectiveness of the implementation of the supervision system carried out by the Food and Drug Supervisory Agency and increase legal awareness for the public by involving all stakeholders. involved in synergistic cooperation in efforts to enforce criminal law against business actors who trade in cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency with e-commerce transactions.

Keyword : cosmetics, not registered, e-commerce

ABSTRAK

Andara Rivo Octavianto. 201820252006. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang memperjualbelikan Kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dengan transaksi *E-Commerce*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM melalui offline atau e-commerce berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk mengetahui upaya pembaharuan hukum pidana di bidang transaksi kosmetik secara e-commerce dalam sistem hukum di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Negara hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris bernula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban pelaku tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui offline ataupun e-commerce berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melalui proses persidangan dalam putusan pengadilan hakim menjatuhkan hukuman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang kesehatan maupun undang-undang tentang perlindungan konsumen bahkan dapat dijatuhkan dengan pertimbangan pidana bersyarat yang pada akhirnya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan upaya pembaharuan hukum pidana di bidang transaksi kosmetik secara e-commerce dalam sistem hukum di Indonesia memerlukan penataan kembali pada institusi/kelembagaan pemerintah terhadap ketidakefektifan pelaksanaan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam kerjasama yang sinergis dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang memperjual belikan kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan transaksi e-commerce.

Kata kunci : kosmetik, ijin edar, e-commerce

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	11
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	11
1.2.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	13
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, dan Kerangka Konseptual.....	13
1.4.1 Kerangka Teori.....	13
1.4.2 Kerangka Pemikiran.....	35
1.4.3 Kerangka Konseptual.....	35
1.5 Metode Penelitian.....	36
1.6 Sistematika Penulisan.....	39
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 41
2.1 Tinjauan tentang Kosmetik dan Sistem Pengawasan Peredaran Kosmetik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.....	41
2.1.1 Tinjauan Tentang Kosmetik.....	41
2.1.2 Sistem Pengawasan Peredaran Kosmetik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.....	47
2.2 Transaksi E-Commerce.....	54

2.3 Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	67
2.3.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	67
2.3.2 Tinjauan Tentang Pemidanaan.....	74
2.4 Tindak Pidana Kesehatan.....	77
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 84
3.1 Jenis Penelitian.....	84
3.2 Pendekatan Penelitian.....	84
3.3 Sumber Data Penelitian.....	85
3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	86
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data.....	86
3.4.2 Teknik Pengolahan Data.....	87
3.5 Teknik Analisa Data.....	87
 BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	 89
4.1 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedar Kosmetik yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	89
4.1.1 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedar Kosmetik yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 543/Pid.Sus/2019/ PN Bpp.....	89
4.1.2 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedar Kosmetik yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 612/Pid.Sus/2018/PN Pdg.....	99
4.1.3 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedar Kosmetik yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 143/Pid.Sus/2019/ PN Ktb.....	109
4.2 Data Pengunjung E-Commerce dan Akibat Penggunaan Kosmetik Ilegal.....	118
4.3 Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Bidang Tansaksi Kosmetik secara <i>E-Commerce</i> dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	122

BAB V PENUTUP.....	127
5.1 Kesimpulan.....	127
5.2 Saran.....	127



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan hidayahNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang memperjualbelikan Kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dengan transaksi *E-Commerce*, ini dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Di dalam tesis ini, penulis dengan rendah hati mengakui bahwa terdapat banyak kekurangan, hal ini tiada lain karena keterbatasan kemampuan dan adanya kesulitan-kesulitan dalam proses penyusunannya. Namun, berkat dorongan dan bantuan dari semua pihak yang sangat berarti, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada seluruh pihak yang mendorong baik moril maupun material.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan pula kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM Dekan Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH.,MH, selaku Pembimbing I
4. Ibu Dr. Noviriska, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing II
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.

Semoga segala bantuan dan amal kebaikan semua pihak mendapatkan pahala dan imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 28 Juli 2021

Andara Rivo Octavianto